DINAS KOMINFO
KAB. BENGKULU UTARA

RENJA 2024

RENCANA KERJA
Organisasi Perangkat

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 46 Arga Makmur

www.diskominfo.bengkuluutarakab.go.id

diskominfo@bengkuluutarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara. Diharapkan nantinya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) 2024 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 dibuat, agar dapat menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan untuk melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi serta dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas dalam pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

Arga Makmur, 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara

ZAHRIN., S.Sos.
NIP. 19650521 198602 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR BAGAN vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMAATIKA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 dan Capaian Renstra OPD 14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 61
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 63
2.5 Inovasi Perangkat Daerah 71
2.5 Penghargaan 73

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 74
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD 75
3.3 Program dan Kegiatan 77

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 86
BAB V PENUTUP 93

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD	17
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	28
Tabel	2.3	Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD	58
Tabel	2.4	Review Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024	63
Tabel	2.5	Daftar Penghargaan	73
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program & Kegiatan OPD Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025	78
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program & Kegiatan	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Eselon.....40
Gambar 2.2 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....41
Gambar 2.3 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....41

DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.....43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bengkulu Utara menyusun Renja Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;

c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan dokumen–dokumen perencanaan harus saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak bertentangan dengan visi misi kepala daerah. Serta harus memperhatikan dokumen perencanaan tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada

akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerintah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang–undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2022.
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2022.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
18. Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara Nomor 000.7/1/PEMKAB BU/2023 Tahun 2023 Tanggal 04 Juli 2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan sektor Komunikasi, Informatika dan Statistik di Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 1 tahun (2024).

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah:

1. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan

sektor Komunikasi Informatika Provinsi Bengkulu;

2. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman kepada RPJMD Provinsi Bengkulu;
3. Menyusun program/kegiatan pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, baik yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, maupun program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 dan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, proses penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peratuaran lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarann OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 dan Capaian Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2023 (sampai dengan Triwulan ke-2) dan perkiraan capaian Tahun 2023 (Tahun berjalan yaitu Triwulan ke-3) mengacu pada APBD Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD, dan

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis OPD, organisasi dalam OPD, tugas dan fungsi pelayanan OPD, pedoman pelaksanaan pelayanan pada OPD, keterkaitan program Pemerintah Provinsi dengan OPD, dan Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.6. Inovasi Daerah

2.7. Penghargaan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

3.3. Program dan Kegiatan memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai program dan kegiatan serta rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2024.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi

perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Tahun 2017 merupakan tahun pertama berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. Seiring dengan berjalannya pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2021 yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2021 lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara mulai menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SKPD). Penyusunan program dan kegiatan bertujuan untuk mengarahkan Dinas dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas. Disisi lain banyak hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan-perbaikan agar Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 s/d 2026 pada akhirnya dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan secara umum adalah menjalankan fungsi SKPD dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat, penyelenggaraan sarana pendukung e-government, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk selanjutnya pada Bab ini akan dibahas mengenai kajian terhadap Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 (s.d Triwulan ke-4) dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 s/d 2026, telah disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang tertuang pada Renstra SKPD, walaupun masih banyak hal-hal yang memerlukan biaya tambahan untuk mencapai target kinerja yang maksimal. Berdasar hasil pelaksanaan program dan kegiatan ada beberapa yang tidak dapat berjalan sesuai dengan Renstra Dinas. Keterbatasan dana merupakan salah satu faktor yang paling utama, disisi lain ada program dan kegiatan yang sifatnya prioritas dan harus segera dilaksanakan, sehingga mengesampingkan kegiatan lainnya.

Untuk lebih mengetahui tingkat capaian realisasi target Renja dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 s.d Triwulan ke-4 (Desember 2023) dapat dilihat pada Tabel. 2.1. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s.d triwulan ke-4 tahun 2023 pada halaman berikut ini :

Tabel.2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD S.D Triwulan Ke-4 Tahun 2023

(Tabel T-C.23 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (PERIODE AKHIR RENSTRA)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021 (TAHUN n-3)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 (TAHUN n-2)						TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN/ TAHUN n-1)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN/ n-1)			
												TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022 (TAHUN n-2)		REALISASI RENJA TAHUN TAHUN 2022 (TAHUN n-2)		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN/TAHUN n-1)		REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
2						***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***																		
2	***16***					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***																		
2	**16**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH**	**99.52**	**%**	**84**	**%**	**98%**	**%**	**98%**	**%**	**100**	**%**	**98,75**	**%**	**25**	**%**	**25**	**%**
2	**16**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**28**	**%**	**28**	**%**
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	**%**	1	Dokumen	0	Dokumen	0	**%**
2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	**%**	2	Dokumen	0	Dokumen	0	**%**
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8										2	Dokumen	0	Dokumen	0	**%**

2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8									2	Dokumen	2	Dokumen	100	%
2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%	4	Laporan	2	Laporan	50	%
2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Laporan	0	Laporan	0	%
2	**16**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**32**	**%**	**32**	**%**
2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28/14	Orang dan Bulan	100	%	100	%	100	%	100	%	26/14	Orang dan Bulan	26/4	Orang dan Bulan	75	%
2	16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80	Dokumen	100	%	100	%	100	%	100	%	20	Dokumen	6	Dokumen	30	%
2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%	4	Laporan	2	Laporan	50	%

2	**16**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**0**	**%**	0	**%**
2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%	2	Laporan	0	Laporan	0	**%**
2	**16**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	0	**%**
2	16	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70	Paket	-	-	70	-	0	-	0	%	0	Paket	0	Paket	0	**%**
2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	1	Orang	2	Orang	0	Orang	0	%	0	Orang	0	Orang	0	**%**
2	**16**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**32**	**%**	**32**	**%**
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	100	%	100	%	100	%	100	%	1	Paket	1	Paket	100	%
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	100	%	100	%	100	%	100	%	5	Paket	1	Paket	20	%

2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	100	%	100	%	100	%	100	%	2	Paket	1	Paket	50	%
2	16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	Dokumen	4	Eksemplar	4	Eksemplar	4	Eksemplar	100	%	4	Dokumen	4	Dokumen	100	%
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126	Laporan	28	Kali	40	Kali	40	Kali	100	%	41	Laporan	10	Laporan	24	%
2	**16**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan BMD**	**12**	**Unit**	**-**	**Unit**	**3**	**Unit**	**0**	**Unit**	**0**	**%**	**0**	**Unit**	**0**	**Unit**	**0**	**%**
2	16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	-	Unit	2	Unit	0	Unit	0	%	0	Unit	0	Unit	0	%
2	16	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	-	Unit	1	Unit	0	Unit	0	%	0	Unit	0	Unit	0	%
2	**16**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**33**	**%**	**33**	**%**
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	100	%	100	%	100	%	100	%	12	Laporan	4	Laporan	33	%
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	100	%	100	%	100	%	100	%	12	Laporan	4	Laporan	33	%

2	**16**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD**	**93**	**%**	**90**	**%**	**90**	**%**	**56,6667**	**%**	**63**	**%**	**90**	**%**	**28**	**%**	**31**	**%**
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	90	%	90	%	90	%	100	%	5	Unit	1	Unit	20	%
2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	80	%	80	%	80	%	100	%	2	Unit	1	Unit	50	%
2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	100	%	100	%	0	%	0	%	0	Unit	0	Unit	0	%
2	**16**	**02**				**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN**	**100,00**	**%**	**24,89**	**%**	**18,45**	**%**	**25,62**	**%**	**139**	**%**	**34,49**	**%**		**%**	**0**	**%**
2	**16**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan**	**5089**	**Informasi**	**1267**	**Informasi**	**939**	**Informasi**	**1304**	**Informasi**	**139**	**%**	**1755**	**Informasi**		**Informasi**	**0**	**%**
2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4	Dokumen	790	Publikasi	748	Publikasi	977	Publikasi	131	%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%

2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	17	Dokumen	324	Publikasi	35	Publikasi	40	Publikasi	114	%	4	Dokumen	1	Dokumen	25	%
2	16	02	2	01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	37	Dokumen	4	Sengketa	6	Sengketa	0	Sengketa	0	%	11	Dokumen	0	Dokumen	0	%
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	131	Dokumen	153 dan 13	Kali Siaran dan Kecamatan	117 dan 14	Kali Siaran dan Kecamatan	287 dan 14	Kali Siaran dan Kecamatan	230	%	31	Dokumen	4	Dokumen	13	%
2	**16**	**03**				**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)**	**85.00**	**%**	**36.00**	**%**	**52.50**	**%**	**55.00**	**%**	**105**	**%**	**60.00**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**
2	**16**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabuapten/kota**	**30**	**Sub Domain**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**%**	**15**	**Sub Domain**	**0**	**Sub Domain**	0	**%**
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daereah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0	%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%

2	**16**	**03**	**2**	**02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota**	**90.91**	**%**	**16**	**%**	**33**	**%**	**33**	**%**	**100**	**%**	**45,45**	**%**	**0**	**%**	0	**%**
2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	4	Dokumen	11	Aplikasi	22	Aplikasi dan OPD	22	Aplikasi dan OPD	100	%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%
2	16	03	2	02	09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota certas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	3	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0	%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%
2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	36	Dokumen	2 dan 26	Ruang Publik dan SKPD	2 dan 25	Ruang Publik dan SKPD	2 dan 25	Ruang Publik dan SKPD	100	%	33	Dokumen	0	Dokumen	0	%
2	16	03	2	02	12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	10	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0	%	2	Dokumen	0	Dokumen	0	%

2	***20***					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK***																	
2	**20**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH**	**55.00**	**%**	**15**	**%**	**40**	**%**	**40**	**%**	**100**	**%**	**45.00**	**%**	**10.00**	**%**	**22**	**%**
2	**20**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan**	**92.00**	**%**	**25**	**%**	**67**	**%**	**67**	**%**	**100**	**%**	**75.00**	**%**	**10.00**	**%**	**13**	**%**
2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	35	Dokumen	15	Publikasi Data	40	Publikasi Data	40	Publikasi Data	100	%	5	Dokumen	1	Dokumen	20	Dokumen
2	***21***					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN***																	
2	**21**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**45.00**	**%**	**0.00**	**%**	**33,33**	**%**	**30.30**	**%**	**91**	**%**	**36.00**	**%**	**2.50**	**%**	**7**	**%**
2	**21**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi**	**45.00**	**%**	**0.00**	**%**	**33,33**	**%**	**30.30**	**%**	**91**	**%**	**36.00**	**%**	**5.00**	**%**	**14**	**%**

2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	19	Laporan	10	Perangkat Daerah	11	Perangkat Daerah	10	Perangkat Daerah	91	%	3	Laporan	0	Laporan	0	%
2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	Perangkat Daerah	-	-	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%	12	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	17	%
2	**21**	**02**	**2**	**02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah**	**45.00**	**%**	**0.00**	**%**	**33,33**	**%**	**30.30**	**%**	**91**	**%**	**36.00**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**
2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15	Perangkat Daerah	35	Surat/Informasi	100	Surat/Informasi	100	Surat/Informasi	100	%	12	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0	%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1 Kondisi Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance melalui electronic government (e – government),* pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengelolaan data statistik sektoral dan sistem keamanan persandian.

Secara Administrasi pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara mencakup wilayah 19 Kecamatan yakni Kecamatan Arga Makmur, Arma Jaya, Hulu Palik, Kerkap, Tanjung Agung Palik, Air Napal, Air Padang, Air Besi, Lais, Batik Nau, Giri Mulya, Padang Jaya, Ketahun, Napal Putih, Putri Hijau, Uluk Kupai, Marga Sakti Sebelat, Pinang Raya dan Kecamatan Enggano.

Capaian kinerja yang telah dicapai secara umum adalah menjalankan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, antara lain adalah menjalankan fungsi OPD untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan

penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas OPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Sampai saat ini, pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika terbagi dalam dua bidang yaitu pelayanan Bidang Komunikasi dan pelayanan Bidang Informasi. Dibidang komunikasi mencakup pelayanan infrastruktur komunikasi yang menunjang sistem pemerintahan dalam bentuk elektronik (*E-Government*) yang cakupannya saat ini hanya sebatas lingkup OPD. Selain itu pelayanan dibidang informasi mencakup penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Media Center, Radio Kharisma, dan Publikasi data statistik sektoral daerah. Kedepan, diharapkan pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika bisa seimbang baik ke OPD maupun ke masyarakat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara 2021 S/D 2023

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2021 (n-2)	TAHUN 2022 (n-1)	TAHUN 2023 (n)	TAHUN 2024 (n+1)	TAHUN 2021 (n-2)	TAHUN 2022 (n-1)	TAHUN 2023 (n)	TAHUN 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)			**84,29**	**98,57**	-	-	**84,29**	**79,52**	-	-	
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)			**100**	**100**	-	-	**100**	**100**	-	-	
Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)			2	1	-	-	2	1	-	-	
Jumlah dokumen RKA (Dokumen)			2	2	-	-	2	2	-	-	
Jumlah dokumen DPA (Dokumen)			2	2	-	-	2	2	-	-	
Jumlah laporan (Dokumen)			2	2	-	-	2	2	-	-	
Jumlah dokumen (Dokumen)			1	1	-	-	1	1	-	-	
Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)			**100**	**100**	-	-	**100**	**100**	-	-	
Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (%)			100	100	-	-	100	100	-	-	
Persentase pemenuhan penatausahaan dan verifikasi keuangan (%)			100	100	-	-	100	100	-	-	
Jumlah laporan (Dokumen)			2	2	-	-	2	2	-	-	

Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah (%)			**0**	**100**	-	-	**0**	**100**	-	-	
Jumlah dokumen (Dokumen)			0	2	-	-	0	2	-	-	
Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah (%)			**100**	**100**	-	-	**100**	**-**	-	-	
Jumlah pakaian dinas (Stel)			**-**	**70**	-	-	**-**	**-**	-	-	
Jumlah ASN yang mengikuti diklat (Orang)			1	2	-	-	1	-	-	-	
Persentase pemenuhan administrasi umum (%)			**100**	**100**	-	-	**100**	**100**	-	-	
Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik (%)			100	100	-	-	100	100	-	-	
Persentase penyediaan bahan logistik kantor (%)			100	100	-	-	100	100	-	-	
Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan (%)			100	100	-	-	100	100	-	-	
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar)			4	4	-	-	4	4	-	-	
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)			39	40	-	-	39	40	-	-	
Jumlah pengadaan BMD (Unit)			**3**	**3**	-	-	**3**	-	-	-	
Jumlah Pengadaan (Unit)			2	2	-	-	2	-	-	-	
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung (Unit)			1	1	-	-	1	-	-	-	
Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)			**100**	**100**	-	-	**100**	**100**	-	-	
Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (%)			100	100	-	-	100	100	-	-	
Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor (%)			100	100	-	-	100	100	-	-	

Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)			**90**	**90,00**	-	-	**90**	**56,67**	-	-	
Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (%)			90	90	-	-	90	90	-	-	
Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (%)			80	80	-	-	80	80	-	-	
Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (%)			100	100	-	-	100	-	-	-	
Persentase Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan (%)			**13,17**	**18,45**	-	-	**13,17**	**25,62**	-	-	
Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan (Informasi)			**670**	**939**	-	-	**670**	**1304**	-	-	
Jumlah Informasi yang dipublikasikan Melalui Media Syber, Media Cetak Harian/Aktual, Media Sosial, Media TV Elektronik. Dan Media Komunikasi Radio (Publikasi)			520	748	-	-	520	977	-	-	
Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui website PPID (Publikasi)			30	35	-	-	30	40	-	-	
Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Sengketa)			4	6	-	-	4	0	-	-	
Jumlah diseminasi (Penyebarluasan)			120	156	-	-	120	287	-	-	
Informasi pembangunan daerah melalui			13	14	-	-	13	14	-	-	

Persentase Capaian Nilai e-government (SPBE) (%)			**46,25**	**52,50**	-	-	**46,25**	**55,00**	-	-	
Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota (%)			**16**	**33**	-	-	**16**	**33**	-	-	
Jumlah Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Aplikasi/Website dan OPD)			11	11 dan 11	-	-	11	11 dan 11	-	-	
Jumlah sarana pos dan telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan (Tower)			98	98	-	-	98	98	-	-	
Jumlah Ruang publik dan SKPD yang			2	2	-	-	2	2	-	-	
tercover jaringan internet (Ruang Publik,			7	25	-	-	7	25	-	-	
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi (%)			**30,30**	**33,33**	-	-	**30,30**	**33,33**	-	-	
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi (%)			**30,30**	**33,33**	-	-	**30,30**	**33,33**	-	-	
Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi (Perangkat Daerah)			10	11	-	-	10	11	-	-	
Jumlah Dokumen Sistem Informasi elektronik / Aplikasi yang dilakukan penilaian (Assessment keamanan sistem informasi elektronik) (Dokumen)			-	2	-	-	-	1	-	-	
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah (%)			**30,30**	**33,33**	-	-	**30,30**	**30.30**	-	-	
Jumlah Surat/ Informasi yang didistribusikan melalui Jaring Komunikasi Sandi (Surat/Informasi)			100	100	-	-	100	100	-	-	
Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah (%)			**24**	**40**	-	-	**24**	**40**	-	-	
Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan (%)			**40**	**67**	-	-	**40**	**67**	-	-	
Jumlah publikasi data statistik sektoral (Publikasi data)			24	40	-	-	24	40	-	-	

Perubahan Indikator dan Target sesuai dengan Kepmendagri-050-5889-Tahun-2021											
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (%)			**-**	**-**	**98,57**	**98,57**	**-**	**-**	**98,57**	**98,57**	
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)			**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			-	-	1	1	-	-	1	1	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			-	-	2	2	-	-	2	2	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			-	-	2	2	-	-	2	2	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			-	-	2	2	-	-	2	2	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			-	-	2	2	-	-	2	2	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			-	-	4	4	-	-	4	4	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			-	-	1	1	-	-	1	1	

Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)			**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			-	-	26/14	26/14	-	-	26/14	26/14	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			-	-	20	20	-	-	20	20	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			-	-	4	4	-	-	4	4	
Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah (%)			**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			-	-	2	2	-	-	2	2	
Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah (%)			**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			-	-			-	-	**-**	**-**	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			-	-	2	1	-	-	**-**	**-**	

Persentase pemenuhan administrasi umum (%)			**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			-	-	1	1	-	-	1	1	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			-	-	5	5	-	-	5	5	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			-	-	2	2	-	-	2	2	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			-	-	4	4	-	-	4	4	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			-	-	41	25	-	-	41	25	
Jumlah pengadaan BMD (Unit)			**-**	**-**	**4**	**2**	**-**	**-**	-	-	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	-	2	1	-	-	-	-	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	-	2	1	-	-	-	-	
Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)			**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			-	-	12	12	-	-	12	12	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			-	-	12	12	-	-	12	12	

Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)			**-**	**-**	**90**	**90**	**-**	**-**	**90**	**90**	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			-	-	5	5	-	-	5	5	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			-	-	2	2	-	-	2	2	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			-	-	1	1	-	-	-	1	
Persentase Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan (%)			**-**	**-**	**34,49**	**51,74**	**-**	**-**	**34,49**	**51,74**	
Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan (Informasi)			**-**	**-**	**1.755**	**2.633**	**-**	**-**	**1.755**	**2.633**	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)			-	-	1	1	-	-	1	1	
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)			-	-	4	5	-	-	4	5	
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)			-	-	11	8	-	-	11	8	
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)			-	-	31	25	-	-	31	25	

Persentase Capaian Nilai e-government (SPBE) (%)			**-**	**-**	**60,00**	**70,00**	**-**	**-**	**60,00**	**70,00**	
Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabuapten/kota (Sub Domain)			**-**	**-**	**15**	**20**	**-**	**-**	**15**	**20**	
Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			-	-	1	1	-	-	1	1	
Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota (%)			**-**	**-**	**45,45**	**60,61**	**-**	**-**	**45,45**	**60,61**	
Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota (Dokumen)			-	-	1	1	-	-	1	1	
Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city (Dokumen)			-	-	1	1	-	-	1	1	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)			-	-	33	1	-	-	33	1	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)			-	-	2	3	-	-	2	3	

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi (%)			**-**	**-**	**36,00**	**39,00**	**-**	**-**	**36,00**	**39,00**	
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi (%)			**-**	**-**	**36,00**	**39,00**	**-**	**-**	**36,00**	**39,00**	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)			-	-	3	7	-	-	3	7	
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)			-	-	12	13	-	-	12	13	
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah (%)			**-**	**-**	**36,00**	**39,00**	**-**	**-**	**36,00**	**39,00**	
Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)			-	-	12	13	-	-	12	13	
Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah (%)			**-**	**-**	**45,00**	**47,00**	**-**	**-**	**45,00**	**47,00**	
Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan (%)			**-**	**-**	**75,00**	**78,00**	**-**	**-**	**75,00**	**78,00**	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumem)			-	-	5	8	-	-	5	8	

2.2.2. Organisasi dan Tata Laksana Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

   Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

2. Tugas Pokok

   Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika yaitu perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengaturan, pengawasan kebijakan pelayanan teknis dan administrasi berdasarkan visi dan misi daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik sesuai dengan visi dan misi daerah;

b) Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

c) Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis di kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Aspek Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 46 Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, Email : diskominfo@bengkuluutarakab.go.id

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 didukung oleh 59 (Lima Puluh Sembilan) orang pegawai/karyawan yang terdiri 26 (Dua Puluh Enam) orang PNS dan 33 (Tiga Puluh Tiga) orang karyawan dengan status Tenaga Harian Lepas (THL). Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Eselonisasi, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2.1

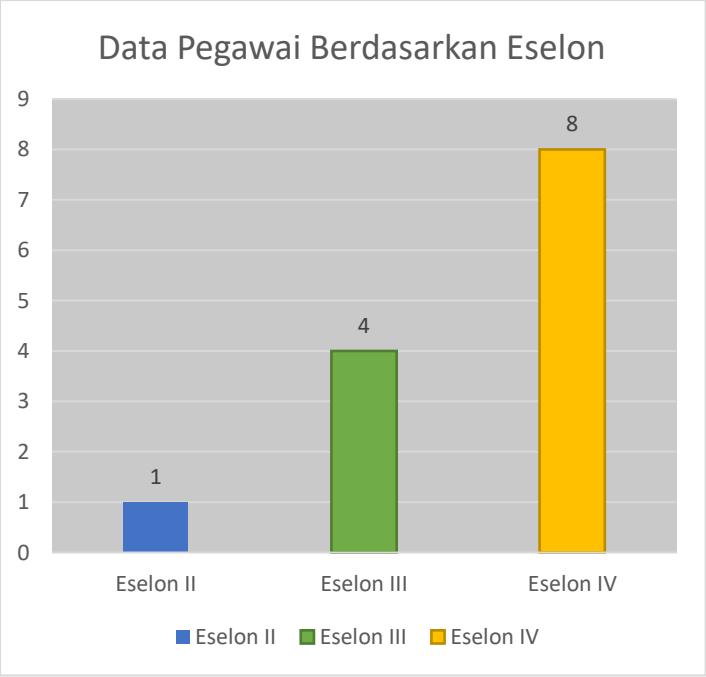

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Gambar 2.2.

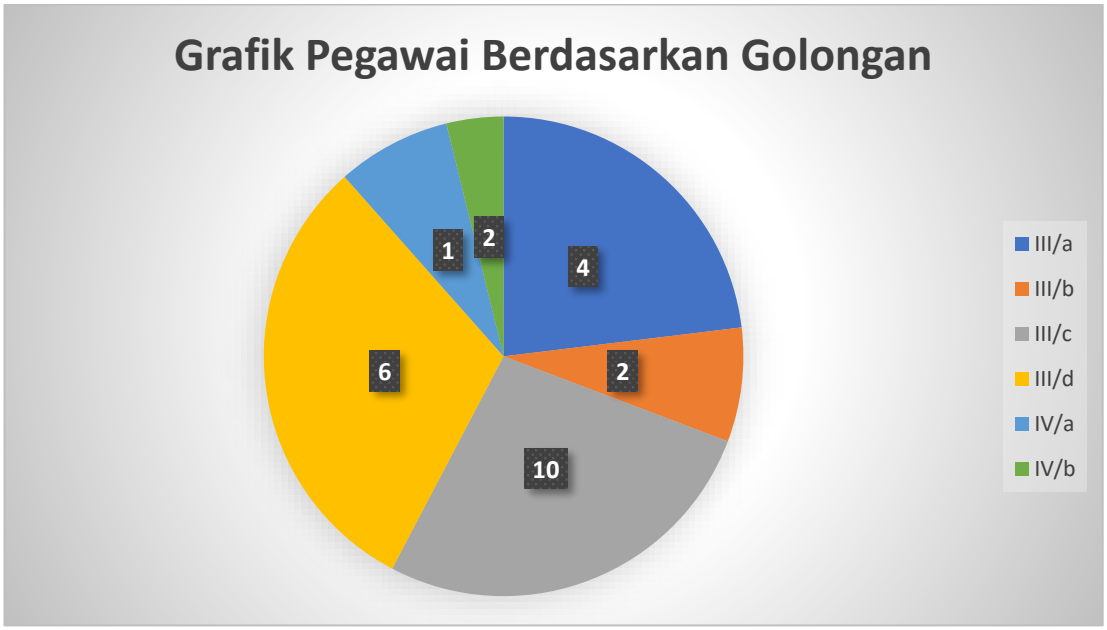

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Gambar 2.3

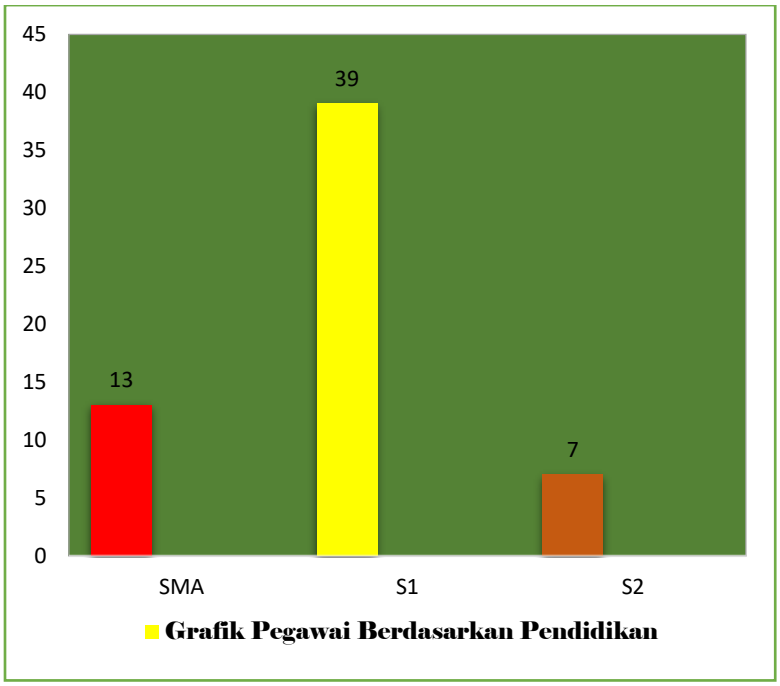

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

5. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, pada gambar 2.1 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bidang Pengelolaan Informasi, yang terdiri atas : Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik, Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik, dan Seksi Pelayananinformasi Publik;
3. Bidang Infrastruktur Dan Teknologi, yang terdiri atas : Seksi Layanan Dasar Infrastruktur, Seksi Layanan Manajemen Data, dan Seksi Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
4. Bidang Persandian dan Statistik, yang terdiri atas : Seksi Pengelolaan Persandian, Seksi Keamanan Persandian, Dan Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan 2.1 dibawah ini :

Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKULU UTARA

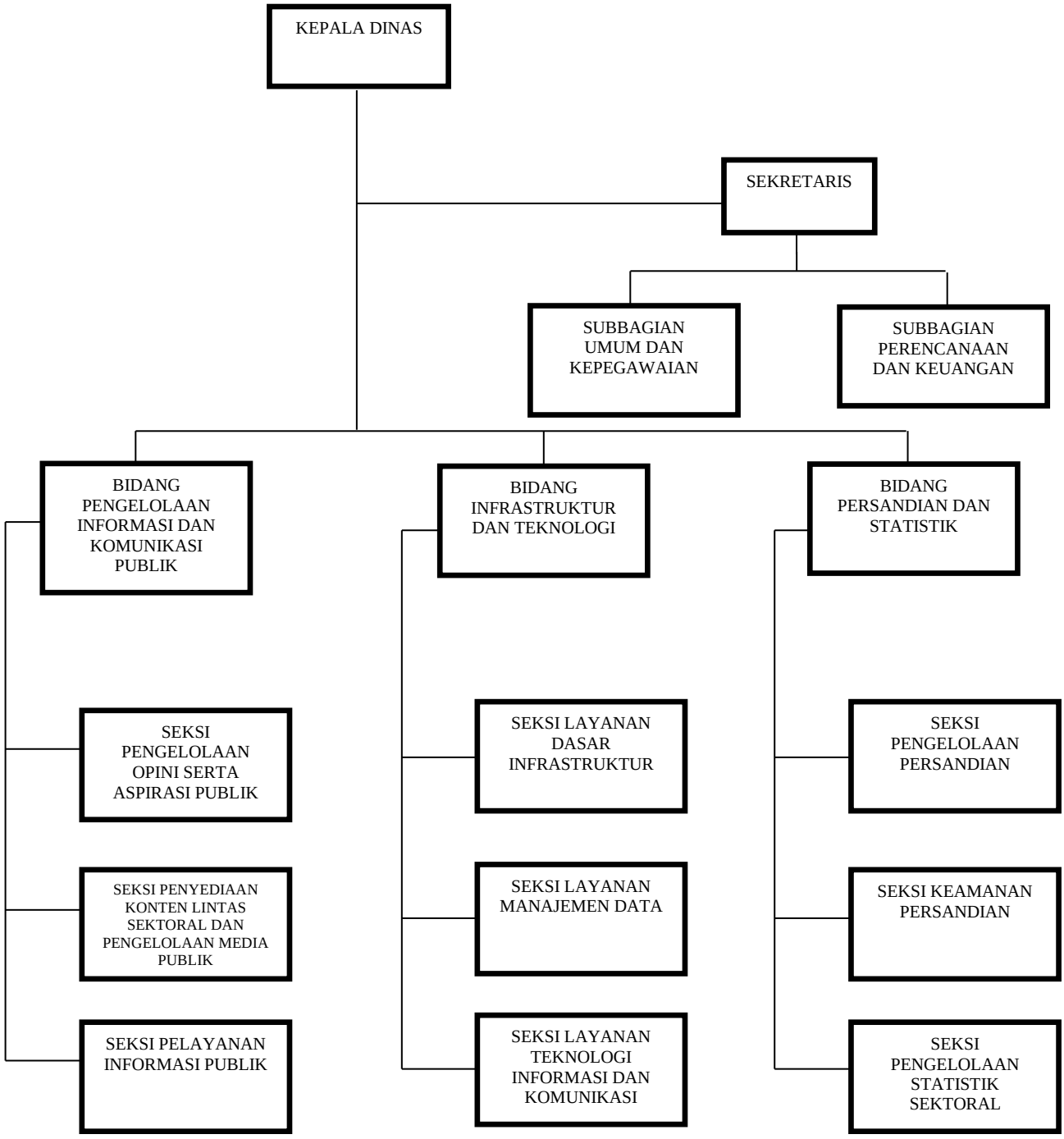

2.2.3. Tugas dan Pelayanan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Fungsi Diskominfo :

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.

Kepala Dinas Mempunyai

Fungsi :

a. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis di kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya.

Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang kesekretariatan.

Tugas Sekretariat

a) Pemrosesan administrasi perkantoran;
b) Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;
c) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d) Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

e) Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

f) Pelaksanaan hubungan masyarakat.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan Dan Keuangan

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, Penyusun, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengaturan, pelaporan dan pengawasan Kegiatan-Kegiatan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Perencanaan, menyusun, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan/peraturan perundang-undangan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

c) Perencanaan, menyusun, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan pelayanan kegiatan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pengelolaan Informasi

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, Pembinaan, Pengaturan dan pengawasan program-program kerja pengelolaan Informasi.
b) Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Informasi;
c) Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengatur dan mengawasi program-program kerja di bidang pengelolaan Informasi;
d) Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
e) Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi Pengelolaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik;
f) Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi Pereencanaan Pelayanan Informasi Publik.

Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan di seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
b) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan monitoring isu publik di media;
c) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengumpulan pendapat umum (polling);
d) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengolahan aduan masyarakat;
e) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan Pememerintah Daerah.

Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan di seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik;
b) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan analisis data Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik;

c) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan lintas sektoral lingkup Nasional dan Daerah;

d) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengemasan ulang konten Nasional menjadi konten lokal;

e) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pembuatan konten lokal untuk Media Komunikasi Publik.

Seksi Pelayanan Informasi Publik

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan di seksi Layanan Informasi dan Humas;

b) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Pendokumentasian dan Pengklasifikasian Informasi Publik serta layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;

c) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Pemetaan dan analisis pemangku kepentingan (stakeholder), pengelolaan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (Briefing notes, backgrounders, dsb);

d) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan Integrasi layanan Pengelolaan hubungan dengan media, lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategi lainnya.

Bidang Infrastruktur dan Teknologi

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government;
b) Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengatur dan mengawasi program-program kerja di bidang Penyelenggaraan e-Government;
c) Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi program Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi;
d) Mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi program Pengembangan Aplikasi;
e) Mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, mengawasi program Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

Seksi Layanan Infrastruktur Dasar

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan di seksi Infrasruktur dan Teknologi;
b) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Infarstruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informatika Pemerintah Kab/Kota;
c) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Akses Internet dan Intranet;

Seksi Layanan Manajemen Data

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan di seksi Layanan Manajemen data;
b) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kab/Kota;
c) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan Penyelenggaraan Ekositem TIK Smart Kab/Kota.

Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan di seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Pendokumentasian dan Pengklasifikasian Informasi Publik serta layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;
c) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan Pemetaan dan analisis pemangku kepentingan (stakeholder), pengelolaan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (Briefing notes, backgrounders, dsb);
d) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan pengawasan kegiatan Integrasi layanan Pengelolaan hubungan dengan media, lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategi lainnya.

Bidang Persandian dan Statistik

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Persandian, Pengamanan Persandian dan Pengelolaan Statistik Sektoral;
b) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan program Pengelolaan Persandian;
c) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan Pengamanan Persandian;
d) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan Pengelolaan Statistik Sektoral.

Seksi Pengelolaan Persandian

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b) Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
c) Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jarring komunikasi sandi;
d) Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;

e) Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

f) Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

g) Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;

h) Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

i) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

j) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

k) Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

l) Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

m) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

Seksi Pengamanan Persandian

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

b) Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

c) Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;

d) Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

e) Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

f) Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

g) Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi

h) Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

i) Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

j) Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;

k) Pengamanan informasi elektronik;

l) Pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

m) Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

n) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral

mempunyai tugas dan fungsi :

a) Merencanakan kegiatan urusan Data dan Statistik yang meliputi data perencanaan pembangunan daerah dan urusan statistik;

b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

c) Menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Data dan Statistik sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

d) Menyiapkan bahan-bahan urusan Data dan Statistik sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

e) Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja Data dan Statistik wilayah oleh Sekretariat;

f) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pembangunan daerah bidang Data dan Statistik;

g) Mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Data dan Statistik;

h) Melaksanakan Penyusunan dan pengembangan data indikator makro pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara;

i) Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang Data dan Statistik;

j) Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

k) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten;

l) Melaksanakan pelaporan data dan informasi pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara;

m) Menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten;

n) Menyiapkan bahan pemberiandukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten;

o) Melaksanakan statistik sektoral skala Kabupaten;

p) Melaksanakan Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten;

q) Membagi tugas dan mengontrol sub bidang Data dan Statistik;

r) Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

s) Melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup sub bidang Data dan Statistik;

t) Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup sub bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

u) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

v) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanan pembangunan Data dan Statistik kepada atasan;

w) Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

x) Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

y) Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

z) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2.4. Keterkaitan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan RPJMD Diskominfo Statistik Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu dan Renstra Kemenkominfo

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Diskominfo BU	Sasaran Renstra Diskominfotik Provinsi Bengkulu	Sasaran Renstra Kemenkominfo
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik elektronik dan media	Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Nilai Indeks e-Government (SPBE)	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola		Persentase Regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan	Meningkatnya konektivitas layanan

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Diskominfo BU	Sasaran Renstra Diskominfotik Provinsi Bengkulu	Sasaran Renstra Kemenkominfo
			SPBE	
4	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		Persentase Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
5.	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data statistik sektoral yang terkelola	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan public bidang pos, telekomunikasi dan informatika
6.	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota		Persentase OPD yang menggunakan dan mengelola data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis
7	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian (Indeks Persandian)	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
8	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Persentase kenaikan tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
9	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Diskominfo BU	Sasaran Renstra Diskominfotik Provinsi Bengkulu	Sasaran Renstra Kemenkominfo
10	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
11	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			
12	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 s/d 2026, maka Visi dan Misi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021 s/d 2026 harus didukung oleh Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Sebagai bentuk *responsibility* SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara terhadap fungsi organisasi, maka rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disesuaikan dengan beban tugas organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utaradan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagaimana tercantum dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, isu – isu strategis yang dihadapi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan

infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, guna terciptanya E-goverment (Pemerintahan secara elektronik);

b. Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang belum maksimal sebagai mitra pemerintah yang menjadi penyambung pemerintah dengan masyarakat sampai tingkat desa;
c. Desiminasi informasi pembangunan pemerintah daerah yang belum maksimal tersampaikan kepada masyarakat sehingga perlu ada inovasi selain kegiatan pameran pembangunan dan media informasi yang belum berbasis TIK;
d. Masih banyaknya permohonan pengaduan ke Komisi Informasi yang belum terselesaikan di PPID Pembantu dan pelayanan yang belum berbasis TIK;
e. Data statistik yang dilaksanakan kerjasama dengan BPS Kabupaten Bengkulu Utara perlu diadakan evaluasi untuk keakuratan datanya dan Data Statitik yang berbasis website belum terbangun.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara

NO	RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		KKEBUTUHAN DANA (RP)	
1	2	5	7			14	2	5	7			14	5
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					*4.388.018.560*	*DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA*					*5.048.018.560*	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DINAS KOMINFO**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH**	**98,57**	**%**	**2.476.018.560**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DINAS KOMINFO**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH**	**98,57**	**%**	**2.530.018.560**	
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**77.890.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**77.890.000**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	70.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	70.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2.511.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2.511.000	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2.000.000	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	2.100.000	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.279.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.279.000	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.209.278.861**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.203.278.861**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 14	Orang Bulan	2.111.978.861	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 14	Orang Bulan	2.111.978.861	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	Dokumen	90.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	Dokumen	90.000.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	7.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1.300.000	

1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**20.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**20.000.000**	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	20.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	20.000.000	
1,4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah**		**%**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah**		**%**		
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		
1,5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan administrasi umum**	**100**	**%**	**48.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan administrasi umum**	**100**	**%**	**108.000.000**	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.000.000	

1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	20.000.000	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	12.000.000	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	5.000.000	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	70.000.000	
1,6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Jumlah pengadaan BMD**		**Unit**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Jumlah pengadaan BMD**		**Unit**		
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		
1,7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang**	**100**	**%**	**81.649.699**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang**	**100**	**%**	**81.649.699**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	39.289.699	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	39.289.699	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	42.360.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	42.360.000	

1,8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD**	**90**	**%**	**39.200.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme**	**Dinas Kominfo**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD**	**90**	**%**	**39.200.000**	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	30.000.000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	1.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	1.200.000	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unti	8.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unti	8.000.000	
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**DINAS KOMINFO**	**PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN**	**51,74**	**%**	**1.388.000.000**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**DINAS KOMINFO**	**PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN**	**51,74**	**%**	**1.488.000.000**	
2,1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kominfo**	**Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan**	**2.633**	**Informasi**	**1.388.000.000**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kominfo**	**Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan**	**2.633**	**Informasi**	**1.488.000.000**	
2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	1.155.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	1.205.000.000	
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	Dokumen	18.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	Dokumen	48.000.000	

2.1.3	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	8	Dokumen	15.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	8	Dokumen	35.000.000	
2.1.4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	25	Dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	25	Dokumen	200.000.000	
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**DINAS KOMINFO**	**PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)**	**70,00**	**%**	**460.800.000**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**DINAS KOMINFO**	**PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)**	**70,00**	**%**	**959.100.000**	
3,1	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabuapten/kota**		**Sub Domain**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabuapten/kota**		**Sub Domain**		
3.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daereah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daereah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		
3,2	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kominfo**	**Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota**	**60,61**	**%**	**460.800.000**	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kominfo**	**Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota**	**60,61**	**%**	**959.100.000**	
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	1	Dokumen	274.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	1	Dokumen	473.000.000	

3.2.2	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota certas dan kota cerdas	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1	Dokumen	96.800.000	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota certas dan kota cerdas	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1	Dokumen	396.100.000	
3.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	30.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	30.000.000	
3.2.4	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3	Dokumen	60.000.000	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3	Dokumen	60.000.000	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**KABUPATEN BENGKULU UTARA**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH**	**47,00**	**%**	**10.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**KABUPATEN BENGKULU UTARA**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH**	**47,00**	**%**	**15.000.000**	
4,1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan**	**78,00**	**%**	**10.000.000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan**	**78,00**	**%**	**15.000.000**	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8	Dokumen	15.000.000	

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**KABUPATEN BENGKULU UTARA**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**39,00**	**%**	**53.200.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**KABUPATEN BENGKULU UTARA**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**39,00**	**%**	**55.900.000**	
5,1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi**	**39,00**	**%**	**20.000.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi**	**39,00**	**%**	**22.700.000**	
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7	Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7	Laporan	10.000.000	
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13	Perangkat Daerah	10.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13	Perangkat Daerah	12.700.000	
5,2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah**	**39,00**	**%**	**33.200.000**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah**	**39,00**	**%**	**33.200.000**	
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	13	Perangkat Daerah	33.200.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	13	Perangkat Daerah	33.200.000	

2.5 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis Inovasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Inovasi Digital yang berbentuk inovasi pelayanan publik menggunakan digitalisasi LPPL Radio Kharisma Ratu Samban.

Sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik, perwujudan pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan saluran informasi publik. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara menyediakan LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sebagai sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang memungkinkan masyarakat mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara di semua wilayah. Untuk pelaksanaan inovasi daerah, menggunakan media digital sudah dilakukan oleh LPPL Radio Kharisma Ratu Samban, yaitu menggunakan website, media sosial facebook, dan play store sudah berlangsung sejak tahun 2020. Selain dari itu adanya narasumber-narasumber yang lebih berkompeten dengan program yang bisa diajukan guna menunjang perkembangan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. Sumber-sumber yang mendukung pembangunan ini diantaranya bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah daerah, instansi lintas sektoral, stakeholder, BUMN, BUMD, dan organisasi atau personal lainnya.

Tujuan utama dari LPPL Radio Kharisma Ratu Samban yaitu untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif negara. LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara agar sampai kepada masyarakat melalui media digital yaitu sarana diseminasi informasi yang bersifat digital dengan karakteristik interaktif yang bersifat jaringan dengan menggunakan baik komputer, laptop, gadget perangkat penyiaran dan internet melalui website dan jejaring sosial. Adanya media digital yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas dengan tidak lagi berbatas pada wilayah. Artinya masyarakat saat ini dapat mengakses informasi dari LPPL Radio Kharisma tidak hanya menggunakan Frekuensi saja akan tetapi dapat menggunakan media digitalnya juga. Adanya program pembangunan daerah yang mendapatkan porsi sebagai salah satu program untuk meningkatkan promosi pembangunan, seperti kegiatan promosi UMKM melalui Radio Kharisma Ratu Samban. Menghadirkan narasumber yang berkompeten seperti pemilik usaha, stakeholder yang berkaitan dengan wirausaha dan sejenisnya. Adapun hasil dari inovasi ini ialah mampu meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.6 Penghargaan

Tabel 2.5
Daftar Penghargaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Peringkat Kedua Kategori Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika BengkuluUtara
2.	Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Badan Publik Tahun 2019	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika BengkuluUtara
3.	Anugerah KPID Bengkulu Awards 2020 (Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran Pemkab Bengkulu Utara)	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara
4.	Anugerah KPID tahun 2022 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Bengkulu Utara pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue Kerja pada 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan tanpa adanya Kebijakan Nasional yang dapat dipedomani untuk menjalankan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, baik kebijakan lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun kebijakan eksternal berupa peluang dan ancaman. Perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan kepada bagaimana mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mengantisipasi segala ancaman yang mungkin muncul.

Melalui interaksi faktor internal-ekternal, maka perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan kepada terlaksananya pelayanan yang prima oleh aparat yang bersih dan berwibawa menuju provinsi termaju di Indonesia. Semua aspek ini telah direncanakan secara berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengusung visi pembangunan nasional "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur".

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tipe C, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengaturan, pengawasan kebijakan pelayanan teknis dan administrasi berdasarkan visi dan misi daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

1. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik sesuai dengan visi dan misi daerah;

2. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis di kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Infrastruktur dan teknologi, serta Bidang Persandian dan Statistik.

Dengan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, sasaran target kinerja Renstra SKPD serta RKPD, maka tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatnya layanan pemerintah berbasis elektronik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran:

1. Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD Tahun 2021-2026 maka secara sistematis diuraikan mengenai rekapitulasi rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1 yang berisi rencana urusan, program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target program dan kegiatan, lokasi program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif APBD untuk masing-masing program/kegiatan.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2024			TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025
1						2	7	5			14					15
2						***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***					**4.388.018.560**						**6.185.380.709**
2	***16***					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***				**4.324.818.560**						**6.020.380.709**
2	**16**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH**	**DINAS KOMINFO**	**98,57**	**%**	**2.476.018.560**	**APBD**	**-**	**99,05**	**%**	**4.095.380.709**
2	**16**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**100**	**%**	**77.890.000**	**APBD**	**-**	**100**	**%**	**127.750.000**
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	1	Dokumen	70.000.000	APBD	-	1	Dokumen	70.000.000
2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	2	Dokumen	2.511.000	APBD	-	2	Dokumen	15.000.000
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen				2	Dokumen	

2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kominfo	2	Dokumen	2.000.000	APBD	-	2	Dokumen	7.750.000
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	Dokumen				2	Dokumen	
2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	4	Laporan	2.100.000	APBD	-	4	Laporan	25.000.000
2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	1	Laporan	1.279.000	APBD	-	1	Laporan	10.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**100**	**%**	**2.209.278.861**	**APBD**	**-**	**100**	**%**	**3.461.199.273**
2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	26 14	Orang Bulan	2.111.978.861	APBD	-	28 14	Orang Bulan	3.334.199.273
2	16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo	20	Dokumen	90.000.000	APBD	-	20	Dokumen	120.000.000
2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	4	Laporan	7.300.000	APBD	-	4	Laporan	7.000.000

2	**16**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**	**100**	**%**	**20.000.000**	**APBD**	**-**	**100**	**%**	**30.000.000**
2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kominfo	2	Laporan	20.000.000	APBD	-	2	Laporan	30.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Kominfo**		**%**				**100**	**%**	**65.000.000**
2	16	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kominfo		Paket				70	Paket	30.000.000
2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kominfo		Orang				2	Orang	35.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum**	**Dinas Kominfo**	**100**	**%**	**48.000.000**	**APBD**	**-**	**100**	**%**	**125.400.000**
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	1	Paket	1.000.000	APBD	-	1	Paket	3.300.000
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	5	Paket	20.000.000	APBD	-	5	Paket	48.000.000

2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kominfo	2	Paket	2.000.000	APBD	-	2	Paket	7.000.000
2	16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kominfo	4	Dokumen	5.000.000	APBD	-	4	Dokumen	7.100.000
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	25	Laporan	20.000.000	APBD	-	30	Laporan	60.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan BMD**	**Dinas Kominfo**		**Unit**				**3**	**Unit**	**12.900.000**
2	16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Kominfo		Unit				2	Unit	6.900.000
2	16	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Kominfo		Unit				1	Unit	6.000.000
2	**16**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang**	**Dinas Kominfo**	**100**	**%**	**81.649.699**	**APBD**	**-**	**100**	**%**	**142.131.436**
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kominfo	12	Laporan	39.289.699	APBD	-	12	Laporan	62.131.436
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	12	Laporan	42.360.000	APBD	-	12	Laporan	80.000.000

2	**16**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD**	**Dinas Kominfo**	**90**	**%**	**39.200.000**	**APBD**	**-**	**93**	**%**	**131.000.000**
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kominfo	5	Unit	30.000.000	APBD	-	5	Unit	90.000.000
2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kominfo	2	Unit	1.200.000	APBD	-	2	Unit	8.000.000
2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kominfo	1	Unti	8.000.000	APBD	-	1	Unti	33.000.000
2	**16**	**02**				**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN**	**DINAS KOMINFO**	**51,74**	**%**	**1.388.000.000**	**APBD**	**-**	**69,17**	**%**	**1.015.000.000**
2	**16**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan**	**Dinas Kominfo**	**2.633**	**Informasi**	**1.388.000.000**	**APBD**	**-**	**3.520**	**Informasi**	**1.015.000.000**
2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	1	Dokumen	1.155.000.000	APBD	-	1	Dokumen	655.000.000
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	5	Dokumen	18.000.000	APBD	-	4	Dokumen	35.000.000

2	16	02	2	01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dinas Kominfo	8	Dokumen	15.000.000	APBD	-	10	Dokumen	35.000.000
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dinas Kominfo	25	Dokumen	200.000.000	APBD	-	35	Dokumen	290.000.000
2	**16**	**03**				**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)**	**DINAS KOMINFO**	**70,00**	**%**	**460.800.000**	**APBD**	**-**	**77,50**	**%**	**910.000.000**
2	**16**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabuapten/kota**	**Kabupaten Bengkulu Utara**		**Sub Domain**				**25**	**Sub Domain**	**200.000.000**
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daereah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara		Dokumen				1	Dokumen	200.000.000

2	**16**	**03**	**2**	**02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota**	**Dinas Kominfo**	**60,61**	**%**	**460.800.000**	**APBD**	**-**	**75,76**	**%**	**710.000.000**
2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Dokumen	274.000.000	APBD	-	1	Dokumen	205.000.000
2	16	03	2	02	09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota certas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Dokumen	96.800.000	APBD	-	1	Dokumen	110.000.000
2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Dokumen	30.000.000	APBD	-	1	Dokumen	295.000.000
2	16	03	2	02	12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kabupaten Bengkulu Utara	3	Dokumen	60.000.000	APBD	-	2	Dokumen	100.000.000
2	***20***					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK***					***10.000.000***					***45.000.000***
2	**20**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH**	**KABUPATEN BENGKULU UTARA**	**47,00**	**%**	**10.000.000**	**APBD**	**-**	**50,00**	**%**	**45.000.000**
2	**20**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**78,00**	**%**	**10.000.000**	**APBD**	**-**	**83,00**	**%**	**45.000.000**
2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Bengkulu Utara	8	Dokumen	10.000.000	APBD	-	10	Dokumen	45.000.000

2	***21***					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN***					***53.200.000***					***120.000.000***
2	**21**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**KABUPATEN BENGKULU UTARA**	**39,00**	**%**	**53.200.000**	**APBD**	**-**	**42,00**	**%**	**120.000.000**
2	**21**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**39,00**	**%**	**20.000.000**	**APBD**	**-**	**42,00**	**%**	**70.000.000**
2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Bengkulu Utara	7	Laporan	10.000.000	APBD	-	12	Laporan	35.000.000
2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kabupaten Bengkulu Utara	13	Perangkat Daerah	10.000.000	APBD	-	14	Perangkat Daerah	35.000.000
2	**21**	**02**	**2**	**02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah**	**Kabupaten Bengkulu Utara**	**39,00**	**%**	**33.200.000**	**APBD**	**-**	**42,00**	**%**	**50.000.000**
2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kabupaten Bengkulu Utara	13	Perangkat Daerah	33.200.000	APBD	-	14	Perangkat Daerah	50.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahunan, Kedudukan Tahun Rencana (RKPD) dan Capaian Kinerja yang di rencanakan dalam RPJMD. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Harus mewakili Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	PROGRAM/OUTCOME				KEGIATAN, SUB KEGIATAN/ OUTPUT				PAGU INDIKATIF 2024	PRAKIRAAN MAJU 2025	JENIS PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
										KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2						***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***												**5.048.018.560**	**6.185.380.709**		
2	***16***					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***												**4.977.118.560**	**6.020.380.709**		
2	**16**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN**	**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	**DINAS KOMINFO**	**TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH**	**%**	**98,57**					**2.555.018.560**	**4.095.380.709**	**PROGRAM LANJUTAN**	**DINAS KOMINFO**
2	**16**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Reformasi Birokrasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Dinas Kominfo**					**Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**77.890.000**	**127.750.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	70.000.000	70.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2.511.000	15.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
														Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2				
2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2.000.000	7.750.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
														Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2				
2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2.100.000	25.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terlaksananya Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1.279.000	10.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	**16**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Reformasi Birokrasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Dinas Kominfo**					**Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**2.203.278.861**	**3.461.199.273**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	26 14	2.111.978.861	3.334.199.273	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	90.000.000	120.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	1.300.000	7.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	**16**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Reformasi Birokrasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Dinas Kominfo**					**Terpenuhinya administrasi BMD perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**20.000.000**	**30.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	20.000.000	30.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	**16**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Reformasi Birokrasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Dinas Kominfo**					**Terpenuhinya kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**25.000.000**	**65.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	30.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten. (3B1)	Dinas Kominfo					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	25.000.000	35.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	**16**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Reformasi Birokrasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Dinas Kominfo**					**Terpenuhinya administrasi umum**	**Persentase pemenuhan administrasi umum**	**%**	**100**	**108.000.000**	**125.400.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	3.300.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	20.000.000	48.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	12.000.000	7.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	5.000.000	7.100.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	70.000.000	60.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	**16**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Reformasi Birokrasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Dinas Kominfo**					**Terpenuhinya pengadaan BMD**	**Jumlah pengadaan BMD**	**Unit**			**12.900.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			6.900.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			6.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	**16**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Reformasi Birokrasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Dinas Kominfo**					**Terpenuhinya jasa penunjang**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100**	**81.649.699**	**142.131.436**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	39.289.699	62.131.436	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	42.360.000	80.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	**16**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme**	**Reformasi Birokrasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Dinas Kominfo**					**Terpeliharanya BMD**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD**	**%**	**90**	**39.200.000**	**131.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	Dinas Kominfo
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	30.000.000	90.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	1.200.000	8.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unti	1	8.000.000	33.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	**16**	**02**				**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**	**MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**DINAS KOMINFO**	**TERLAKSANANYA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN**	**PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN**	**%**	**51,74**					**1.463.000.000**	**1.015.000.000**	**PROGRAM LANJUTAN**	**DINAS KOMINFO**
2	**16**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Infrastruktur**	**Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan**	**Dinas Kominfo**					**Terlaksananya informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan**	**Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan**	**Informasi**	**2.633**	**1.463.000.000**	**1.015.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1.205.000.000	655.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	5	23.000.000	35.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	02	2	01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	8	35.000.000	35.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	25	200.000.000	290.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	**16**	**03**				**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, BIROKRASI REFORMASI PEMERINTAHAN**	**MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**DINAS KOMINFO**	**MENINGKATNYA CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)**	**PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)**	**%**	**70,00**					**959.100.000**	**910.000.000**	**PROGRAM LANJUTAN**	**DINAS KOMINFO**
2	**16**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan**	**Kabupaten Bengkulu Utara**					**Terkelola nya Sub Domain di lingkup pemerintah daerah kabuapten/kota**	**Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabuapten/kota**	**Sub Domain**			**200.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daereah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			200.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	**16**	**03**	**2**	**02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan**	**Dinas Kominfo**					**Terawasinya Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan OPD dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota**	**%**	**60,61**	**959.100.000**	**710.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	Dokumen	1	473.000.000	205.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03	2	02	09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota certas dan kota cerdas	Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Dokumen	1	396.100.000	110.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	30.000.000	295.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03	2	02	12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	3	60.000.000	100.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	***20***					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK***												***15.000.000***	***45.000.000***		
2	**20**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**BIROKRASI REFORMASI PEMERINTAHAN**	**MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**KABUPATEN BENGKULU UTARA**	**TERSEDIANYA DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH**	**%**	**47,00**					**15.000.000**	**45.000.000**	**PROGRAM LANJUTAN**	**DINAS KOMINFO**
2	**20**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Birokrasi Reformasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan**	**Kabupaten Bengkulu Utara**					**Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan**	**Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan**	**%**	**78,00**	**15.000.000**	**45.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	8	15.000.000	45.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	*21*					*URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN*												*55.900.000*	*120.000.000*		
2	**21**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**BIROKRASI REFORMASI PEMERINTAHAN**	**MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**KABUPATEN BENGKULU UTARA**	**MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**%**	**39,00**					**55.900.000**	**120.000.000**	**PROGRAM LANJUTAN**	**DINAS KOMINFO**
2	**21**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Birokrasi Reformasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan**	**Kabupaten Bengkulu Utara**					**Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi**	**%**	**39,00**	**22.700.000**	**70.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	7	10.000.000	35.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	13	12.700.000	35.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	**21**	**02**	**2**	**02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Birokrasi Reformasi Pemerintahan**	**Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan**	**Kabupaten Bengkulu Utara**					**Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah**	**%**	**39,00**	**33.200.000**	**50.000.000**	**Kegiatan Lanjutan**	**Dinas Kominfo**
2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	13	33.200.000	50.000.000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 dalam tujuan penyelenggaraan pembangunan di Bidang Komunikasi,Teknologi Informatika dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.

Keberhasillan Program Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara ditentukan oleh dukungan yang maksimal dari seluruh karyawan dan karyawati serta kerjasama lintas sektoral (SKPD) di Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara maka sasaran pembangunan di Bidang Komunikasi,Teknologi Informatika yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2024 tercatat secara jelas, sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan yang akan datang dapat diukur dan dinilai keberhasilannya

Penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 ini menjadi pedoman pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Bidang/Sub Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga diharapkan dapat mencapai hasil kinerja yang maksimal.

Untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal tersebut diperlukan peningkatan upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Arga Makmur, 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara

ZAHRIN., S.Sos.
NIP. 19650521 198602 1 003